

**PERAN ADVOKAT UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU
DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM
(Studi Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**ZULFIQAR
10200114001**

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFIQAR
Nim : 10200114001
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 25 Mei 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Toddopuli 18 Baru
Judul : Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang mampu
Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Posbakum
Pengadilan Negeri Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Desember 2018

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM

ZULFIOAR

NIM : 10200114001

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar)” yang disusun oleh Zulfiqar, NIM: 10200114001, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 M, bertepatan dengan 13 Rabi’ul-Awwal 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 23 November 2018 M

15 Rabi’ul-Awwal 1439 H

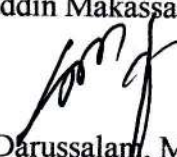
DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Kurniati, M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ashar Sinilele, S.H., M. H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Alimuddin, S. Ag., M. Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

Nip: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini dapat peneliti rampungkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (SI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk kepada orang tua saya Ayahanda Abd Latif dan Ibunda Jubaedah sebagai motivator terbesar yang tidak hentinya bekerja keras dan berdoa demi kelanjutan studi putrinya.

Ucapan terima kasih juga peneliti ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Kurniati, M.Hi, selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan selama masa studi.

5. Bapak Dr. Rahmatiah HL, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Peneliti yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Peneliti yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, motivasi dan dukungan selama masa studi.
7. Bapak Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D selaku Dosen penguji I yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak Ashar Sinilele, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Ibu Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan selama kuliah di UIN ALAUDDIN.
10. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
11. Terimakasih kepada Pihak Pengadilan Negeri Makassar dan Posbakum Pengadilan Makassar yang telah membantu Peneliti dalam memperoleh data penelitian.
12. Keluarga besar SMAN 2 Sinjai, yang memberikan motivasi dan dorongan beserta saran dan kritikan dalam penyusunan tugas akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan 2014 terkhusus HPK A dan teman-teman yang lain yang tidak sempat disebutkan namanya, terima kasih telah memberikan saran dan semangat kepada Peneliti selama ini.
14. Sahabat-sahabatku Muhammad sade, Irwan, Vhyvi Arida Bhayangkara, May Cening Ayu, Nirgahayu, Nurafiah, Irfan, Astuti, Alamsyah, Irwin, Irfan, ikhsan, Jusman, Bismar, Sabir, Akbar, Sulfiani, Indayanti, Mutmainnah, dan Reski Wahyuni yang selalu memberikan semangat dan setia menemani Peneliti dalam menyelesaikan studi.

15. Teman teman seperjuangan di KKN Angkatan 58 Kabupaten Kepulauan Selayar terkhusus kepada teman-teman posko Kecamatan Bontosikuyu Desa Harapan yaitu Nur Hasan Basri, Khairil Aswandi, Vivi Irmayani, Nurul Utami Usmin, Tutut Mawardiani, dan Ratna Indah Sari S.Mat.
16. Terima kasih kepada Guru-guru yang pernah mengajar Peneliti, Skripsi ini adalah bentuk terima kasih dan penghargaan tertinggi penulis atas jasa-jasa para guru selama ini.
17. Terima kasih kepada segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian sangat berarti.

Demikian yang dapat Penyusun sampaikan. Besar harapan penyusun skripsi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apa bila dalam penulisan ini terdapat banyak ketidak sempurnaan. Olehnya, penyusun menerima kritik dan saran pembaca sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi di penulisan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 07 November 2018

Penyusun

Zulfiqar

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11-38
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	11
B. Tinjauan Umum Bantuan Hukum	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38-42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42

BAB IV	ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM	
	MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU	
	DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM	
	DI POSBAKUM	43-59
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
	B. Tindakan Advokat dalam membantu menyelesaikan persoalan hukum masyarakat kurang mampu di posbakum PN Makassar.....	46
	C. Syarat dan bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu.....	52
	D. Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Advokat dalam membantu masyarakat kurang mampu.....	56
BAB V	PENUTUP.....	60-61
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Implikasi Penelitian.....	61
	DAFTAR PUSTAKA.....	62
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
ؤ	<i>damamah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ			

	<i>fathah</i> dan yā'	Ai	a dan i
وْ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> danyā'	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepadanya *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama :Zulfiqar
Nim :10200114001
Judul Skripsi :Peran Advokat untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar)

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran advokat dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum?, adapun sub masalah dalam penelitian ini yaitu:1) bagaimana tindakan para advokat dalam menangani persoalan hukum yang dihadapi masyarakat kurang mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Makassar? 2) bagaimana syarat-syarat dan bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di posbakum Pengadilan Negeri Makassar ?3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran advokat dalam membantu masyarakat kurang mampu?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dan normatif syar'i Adapun yang merupakan sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa advokat, petugas pengadilan negeri Makassar yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian data disusun sedemikian rupa dan dianalisa menggunakan untuk mendapatkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para advokat memiliki tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat kurang mampu yakni menerima semua perkara yang diberikan atau dilaporkan kepadanya, mendampingi sampai perkara mendapat putusan yang tetap, dan tidak meminta biaya kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh bantuan hukum adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan serta bantuan yang di terimah adalah pendampingan dalam sidang sampai mendapat putusan tetap, pemberian informasi, konsultasi, serta pembuatan dokumen hukum. Pandangan hukum Islam terhadap peran advokat adalah perbuatan yang mulia dimana para advokat menggunakan ilmu dan kemampuan yang mereka miliki untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Adapun implikasi Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas yang berada di pengadilan untuk digunakan oleh para advokat untuk melayani masyarakat kurang mampu. Agar para advokat dapat meningkatkan kinerjanya dalam membantu masyarakat kurang mampu. Para advokat harus terus meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar agar kedepannya mampu menangani berbagai permasalahan hukum yang dilaorkan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik, Pengadilan harus melakukan sosialisasi adanya pelayanan bantuan hukum cumacuma tanpa biaya di pos bantuan hukum, dan Pelayanan hukum harus di tingkatkan tidak hanya menyelesaikan masalah yang dilaporkan ke pengadilan tapi harus juga melakukan sosialisasi hukum agar masyarakat mengerti hukum dan mengurangi masalah yang masuk ke pengadilan atau penyelesaian masalah melalui cara damai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum¹. Prinsip negara hukum yaitu negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan, dan persamaan di hadapan hukum. Secara konstitusi persamaan di depan hukum terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dengan adanya pasal tersebut negara wajib memperlakukan warganya secara adil. Salah satu hal yang dilakukan negara Indonesia yaitu penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara. Hal tersebut bermaksud untuk memberi perlakuan yang sama kepada warga negara yang tidak mampu. Bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima honorium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membelah, dan melakukan tindakan hukum lain untuk pencari keadilan yang tidak mampu.²

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 1, ayat 3

² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, pasal 1, ayat 3.

Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang mengajukan hal untuk menyelesaikan masalah hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan agar hak-hak masyarakat tersebut terlindungi, dan terhindar dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Bantuan hukum yang diberikan tersebut bukan dimaksudkan untuk membela kepentingan masyarakat tertentu untuk bebas dari segala tuntutan dalam perkara hukum atau masalah hukum yang dihadapinya, tapi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar hak-haknya terpenuhi dalam proses peradilan, serta penyelesaian yang dapat memberikan keadilan untuk semua.

Bantuan hukum yang dilaksanakan di Indonesia di atur dalam perundang undangan yakni dalam Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setiap orang dalam menjalani hubungannya dengan orang lain, hubungan dengan masyarakat, dan hubungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipastikan akan mengalami atau dihadapkan dengan adanya persoalan hukum. dengan hal tersebut setiap orang berhak untuk membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum. dalam hal masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang tidak mampu menyewa advokat, negara diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan warga kuang mampu berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma tersebut. Karena tidak seorang pun dalam negara yang memegang prinsip hukum boleh diabaikan haknya untuk

memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum denan tidak memerhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.³

Pentingnya memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dan tergolong miskin, baik itu bantuan materi dan bantuan hukum lainnya telah dipeintahkan dalam firman Allah SWT.

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝٨٥

Tejemahnya:

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”(Q.S An-Nisa: 4/85).

Sesuai dengan ayat ini maka kita diperintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil. Maka untuk menetapkan hukum dengan adil diperlukan adanya bantuan hukum untuk membela hak-hak terdakwa di dalam proses peradilan. Pembeian bantuan hukum secara cuma-cuma ditunjukan hanya untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat yang kurang mampu tersebut dapat hak yang sama di hadapan hukum.

Bantuan hukum dalam pengertiannya secara luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Bantuan hukum merupakan sarana yang dapat dipergunakan masyarakat yang kurang mampu untuk menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai

³ Andi Sofyan dan H Abd Asis. *Hukum Acara pidana Suatu Pengantar*(Jakarta:Kencana, 2014), h. 110.

dan sebagai sarana perlindungan manusia sebagai subjek hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan untuk terciptanya keadilan. Bantuan hukum juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di bidang hukum serta menjamin hak-hak masyarakat kurang mampu atau buta hukum agar semua memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum. Program bantuan hukum di Indonesia mulai melembaga dan memiliki ruang lingkup yang luas ditandai dengan berdirinya lembaga bantuan hukum di Jakarta .

Dengan adanya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu negara dibebankan tanggung jawab untuk fasilitas dan pendukung lainnya untuk pelaksanaan program bantuan hukum. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah dengan dibentuknya Pos Bantuan Hukum yang disingkat posbakum di semua lingkup peradilan di Indonesia.

Yang berperan penting dalam proses berjalanya program bantuan hukum kepada masyarakat adalah advokat atau pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.⁴ Advokat merupakan salah satu unsur dalam proses peradilan untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁵ Advokat merupakan salah satu profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab serta merupakan salah satu penegak keadilan selain lembaga peradilan, dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, jaksa, dan hakim. Advokat sebagai penegak hukum ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

⁴Republik Indonesia, "*Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, pasal 1, angka 1

⁵ Viswandro, dkk., *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015), h. 101.

Advokat yaitu “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dengan status sebagai penegak hukum advokat mempunyai berbagai fungsi, tugas, hak dan kewajiban.⁶

Selain itu dalam QS An-Nisa ayat 135 diperintahkan bagi setiap orang mukmin diwajibkan untuk menegakkan keadilan. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوًىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”(Q.S An-Nisa: 4/135).⁷

Ayat tersebut memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk menegakkan keadilan untuk semua tanpa membedakan apakah orang tersebut kaya ataupun miskin. Berdasarkan ayat tersebut kita tidak diperkenankan untuk membedakan antar sesama manusia. Sesuai dengan perintah tersebut maka seorang advokat yang merupakan salah satu penegak hukum dan keadilan maka advokat diwajibkan untuk berlaku adil dalam melakukan pembelaan, serta tidak

⁶ Viswandro, dkk., Mengenal Profesi Penegak Hukum (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015), h. 119.

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan

membedakan perlakuan terhadap klien yang dihadapinya baik yang kaya maupun miskin harus diperlakukan sama.

Salah satu kewajiban advokat adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma hal tersebut diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yaitu “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”Pemberian bantuan hukum cuma-cuma juga terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia dalam pasal 7 huruf h yaitu “advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.”⁸ Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum dan hak seseorang untuk didampingi advokat dalam menghadapi masalah hukum tanpa kecuali.

Advokat merupakan profesi yang mengembangk tugas mulia dalam mekanisme penegakkan hukum dan penegakan keadilan. Oleh karena itu dalam melaksanakan peranya sebagai salah satu penegak hukum meraka harus memiliki tanggung jawab terhadap profesinya dan kesadaran bahwa hal tersebut akan membawa rasa keadilan pada seseorang atau masyarakat.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dengan memilih judul Peran Advokat dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (studi kasus di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar).

⁸Kode Etik Advokat Indonesia, dalam Ismantoro dwi yuwono. *Panduan Memilih Dan Menggunakan Jasa Advokat*. Yogyakarta:Medpress Digital, 2011.

⁹ Viswandro, dkk., *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015), h.130.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu Fokus penelitian ini adalah ingin meneliti bagaimana peran advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

- a. *Peran* adalah perangkat tingkah atau perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁰
- b. *Advokat* adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹¹
- c. *Bantuan hukum* adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya maka dirumuskan pokok permasalahannya bagaimana peran advokat dalam upaya membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum di kota makassar ? untuk membatasi agar rumusan masalah tidak terlalu meluas maka dibuat sub masalah dalam penelitian ini

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta ; Balai Pustaka,2002) h. 570.

¹¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Advokat.

1. Bagaimana tindakan para advokat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat kurang mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Makassar?
2. Bagaimana syarat-syarat dan bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di posbakum Pengadilan Negeri Makassar ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran advokat dalam membantu masyarakat kurang mampu?

D. Kajian Terdahulu

Dalam menyelesaikan penelitian, penulis menggunakan berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Adapun kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Pertama, karya Viswandro, Maria Matilada, dkk, dalam buku “*Mengenal Profesi Penegak Hukum*” buku ini menjelaskan tentang berbagai profesi yang berkaitan dengan penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, advokat dan hakim, menjelaskan tentang sejarah profesi penegak hukum, apa tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Dalam buku ini juga menjelaskan secara singkat kode etik jaksa, advokat, dan hakim. Yang membedakan antara penelitian ini adalah penelitian ini hanya fokus pada kinerja advokat pada pelaksanaan bantuan hukum, sementara buku mengenal profesi penegak hukum membahas semua para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat.

Kedua, karya Agus Raharjo dan Sunarno dalam jurnal media hukum vol.21 No 2 Desember 2014. yang berjudul *Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya* yang

dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana pelaksanaan etika advokat dalam perkara pidana serta bagaimana pengawasan internal atas kinerja advokat.

Ketiga, Mariani dalam tesisnya yang berjudul *peran Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, membahas tentang apakah bantuan hukum yang diberikan oleh LBH APIK telah terakomodasi dalam perundang undangan serta bentuk bentuk bantuan hukum yang diberikan LBH APIK kepada perempuan yang telah bercerai serta bagaimana pemenuhan hak perempuan yang telah bercerai di Kota Makassar ditinjau dari hukum Islam.

Keempat, Nurjannah dalam skripsinya yang berjudul *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (studi kasus:Tahun 2011-2015 di Kota Makassar)*, dalam skripsi ini membahas tentang peranan lembaga bantuan hukum terhadap penanganan kasus yang dilakukan oleh anak serta efektifitas peranan lembaga bantuan hukum yang ada di kota Makassar. Dalam skripsi ini hanya membahas peranan yang dilakukan oleh lembaga sedangkan dalam penelitian ini akan meneliti tentang kinerja advokat yang telah memberikan bantuan hukum.

Kelima, Ashmi Amran dalam skripsinya yang berjudul *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sungguminasa*, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program yang dilakukan oleh posbakum di pengadilan agama sungguminasa serta faktor-faktor apa yang menunjang dan menghambat dalam posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa, yang menjadi pembeda antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini akan meneliti tentang advokat pada Posbakum yang telah melaksanakan tugas serta faktor apa yang memengaruhi kinerja advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di kota Makassar.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan advokat dalam membantu masyarakat kurang mampu di kota Makassar dalam menyelesaikan masalah hukum.
- b. Untuk mengetahui syarat-syarat dan bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran advokat dalam memberikan bantuan advokat kepada masyarakat kurang mampu.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberi tambahan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

b. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat bagaimana peran advokat dalam membantu masyarakat miskin.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjauan Umum Advokat*

1. Pengertian Advokat.

Secara bahasa advokat berasal dari bahasa Latin yaitu *advocare* yang bermakna mempertahankan, memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu, dan menjamin. Secara istilah advokat dapat diartikan sebagai seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi dan menjamin hak dan kewajiban orang yang menerima jasa hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara.²

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dalam pasal 1 angka (1) advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Hal tersebut senada dengan dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) juga menerangkan hal yang sama. Dalam Undang-Undang advokat membedakan antara advokat indonesia dan advokat asing dimana yang di maksud advokat Indonesia adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam

¹Sartono dan Bakhekti suryani, *Prinsip -Prinsip Dasar Profesi Advokat*

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h 10.

bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat, dilarang beracara di sidang pengadilan, berperaktik atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilanya di Indonesia.³

Sedangkan dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 5 tanggal 22 Juni 1972 mengartikan bahwa advokat atau pengacara yaitu mereka yang sebagai mata penceharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman.

Berdasarkan pengertian di atas advokat mempunyai tugas pelayanan kepada penerima jasa hukum. advokat juga dikenal dengan tugas sebagai penasihat hukum yang tugas pokoknya yaitu memberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik bila berada di luar pengadilan sedangkan di dalam pengadilan penasihat hukum bertugas membelah hak-hak kliennya.⁴

2. Persyaratan menjadi advokat.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang bila ingin diangkat menjadi advokat dengan demikian tidak semua orang dapat berprofesi sebagai advoka sebelum memenuhi syarat. Untuk menjadi advokat diperlukan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan hukum yang terus berkembang. Seseorang yang akan menjadi advokat harus mempersiapkan diri dengan segala kemampuan, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, baik hukum formal maupun hukum materil. Selain itu advokat juga harus memiliki sifat, sikap kepribadian, serta akhlak yang terpuji. Organisasi advokat juga berperan penting dalam penyeleksian calon advokat karena organisasi advokat menjadi penyelenggara ujian kode etik advokat.

³Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 53-54

⁴Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 28.

Dalam Undang–Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat seseorang dapat diangkat menjadi advokat sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 yang berbunyi:

- a. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat;
- b. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat;
- c. Salinan putusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pelaporan kepada Mahkamah Agung dimaksudkan untuk pengawasan dan pemantauan terhadap advokat dalam menjalankan tugasnya, walaupun advokat telah diawasi oleh organisasi advokat tempatnya bernaung. Adapun syarat yang harus dipenuhi seseorang bila ingin menjadi advokat adalah;

- 1) Warganegara Republik Indonesia;
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) Tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) Berusia sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
- 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) terus menerus di kantor advokat;
- 8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
- 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁵

⁵Republik Indonesia. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat, Pasal 3 ayat 1.

Seorang sarjana hukum tidak serta merta dapat langsung menjalankan profesi advokat tapi harus melawati berbagai tahapan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 2 Undang-Undang advokat ayat (1) Bahwa yang dapat menjalankan profesi advokat tidak hanya berlatar belakang sarjana hukum saja, tapi harus juga mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat dan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

Sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat di ambil sumpahnya menurut agamanya di sidang terbuka di pengadilan tinggi wilayah hukumnya yang sumpahnya sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang advokat yaitu :

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- a) Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang dasar negara republik indonesia;
- b) Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- d) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

- e) Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
- f) Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.

3. Tugas dan fungsi advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, jasa yang diberikan tersebut dalam Undang-Undang yaitu konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima jasa hukum. selain pemberi jasa hukum advokat juga sebagai penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang advokat yaitu pada pasal 5 ayat 1 advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri.⁶ Tugas advokat yaitu membantu klien dalam menghadapi persidangan serta memberikan pengetahuan proses persidangan di pengadilan yang akan dia lakukan, atau mewakili secara keseluruhan dalam proses persidangan.⁷

Tugas advokat tidak hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara pidana, perdata, tatausaha negara dihadapan pengadilan yang bersifat advokasi tapi tugas advokat juga mencakup hal diluar pengadilan atau *nonlitigasi*. Tugas advokat adalah membelah kepentingan masyarakat dan kliennya advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi masalah hukum.

⁶Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2015) h. 119.

⁷Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 55.

Advokat dalam memberi jasa hukum kepada masyarakat tidak terperinci dalam tugas karena bukan pejabat negara advokat hanya profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa hukum kliennya.

Selain itu advokat juga berfungsi sebagai pejuang untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia dalam suatu negara serta berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya advokat harus menjalankan secara seimbang, profesional dan bertanggung jawab untuk terciptanya keadilan untuk semua.

Pada dasarnya tugas advokat adalah sebagai berikut:

- a. Membela kepentingan masyarakat dan kliennya
- b. Advokat yang dibutuhkan seseorang anggota masyarakat atau lebih untuk menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.
- c. Menjalankan tugas dan kewajibannya setelah di sumpah sesuai kewajibannya masing-masing
- d. Dalam menjalankan tugasnya harus patuh terhadap kode etik profesi advokat sebagai landasan moral dan Undang-Undang advokat yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan profesinya advokat mempunyai fungsi yaitu:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan kode etik advokat;
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam langkah menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f. Menjunjung tinggi citra profesi terhormat;
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
- h. Menjaga dan meningkatkan pelayanan mutu advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara sesuai kode etik advokat;
- j. Memberi pelayanan hukum (legal service);
- k. Memberikan nasehat hukum (legal advice);
- l. Memberikan pendapat hukum (legal opinion);
- m. Memberikan informasi hukum (legal drafting);
- n. Membela kepentingan klien (litigation);
- o. Mewakili klien di muka pengadilan (legal representation);
- p. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu.⁸

4. Hak dan kewajiban advokat.

- a. Hak advokat.

Hak advokat hak advokat adalah kebebasan yang diberikan kepada advokat dalam rangka pembelaan kepada penerima jasa hukum. diuraikan dalam pasal 14,15,16,17 dan 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yakni ;

1) Hak kebebasan dan kemandirian

Hak kebebasan dan kemandirian seorang advokat terdapat dalam pasal 14 dan 15 undang-undang advokat yang berbunyi sebagai berikut:

⁸Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 55-56.

Pasal 14

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15

“advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan.”

Hak kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh advokat untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela klien atau perkara yang ditanganinya baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam mengeluarkan pendapat ini advokat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar kode etik profesi advokat. Sedangkan kebebasan menjalankan tugasnya advokat diberi kebebasan memilih cara untuk menyelesaikan perkara yang sedang ditanganinya.

2) Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, bahwa ia tidak akan dituntut baik secara pidana maupun perdata apabila menjalankan pembelaanya terhadap terdakwa yang ditanganinya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 16 undang-undang advokat yang berbunyi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

3) Hak untuk meminta informasi

Hak untuk meminta informasi adalah hak yang dimiliki oleh advokat untuk meminta informasi terhadap instansi-instansi guna mendapatkan informasi untuk kepentingan pengurusan, penyelesaian perkara yang menjadi

tanggung jawab advokat hal tersebut dimuat dalam pasal 17 Undang-

Undang advokat yang berbunyi:

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

4) Hak ingkar

Hak ingkar adalah hak seorang advokat untuk mengajukan keberatan-keberatan dalam persidangan.

5) Hak memperoleh honorium

Hak memperoleh honorium adalah seorang advokat berhak memperoleh honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatan dengan klien yang menggunakan jasa hukumnya.

6) Hak memberi somasi

Hak memberi somasi adalah hak membuat surat atau teguran langsung yang dilakukan oleh seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang dilakukan oleh advokat tersebut.

7) Hak membuat legal opinion

8) Hak untuk menjalankan praktek hukum di seluruh wilayah Indonesia

Adalah hak dimana seorang advokat berhak menangani perkara dari seorang yang memberikanya kuasa selama berada dalam wilayah indonesia maka advokat berhak menanganinya.

b. Kewajiban advokat

Selain memiliki hak advokat juga memiliki kewajiban untuk bersikap profesional sebagai suatu elemen penting dalam penegakan hukum berdasarkan kode etik advokat indonesia dan Undang-Undang Advokat, dalam menjalankan profesinya advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat,

masyarakat maupun klien. Kewajiban advokat terdapat dalam kode etik advokat Indonesia dan Undang-Undang Advokat.

Kewajiban advokat dalam kode etik advokat Indonesia antara lain yaitu:

- 1) Memelihara rasa solidaritas antara teman sejawat(pasal 3 huruf d kode etik advokat Indonesia);
- 2) Memberi bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena menunjang organisasi profesi (pasal 3 huruf e kode etik advokat Indonesia);
- 3) Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (pasal 4 huruf d kode etik advokat Indonesia);
- 4) Dalam menentukan besarnya honorium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (pasal 4 huruf d kode etik advokat Indonesia);
- 5) Memegang rahasia jabatan tentang hal hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (pasal 4 huruf h kode etik advokat Indonesia);
- 6) Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan di urus advokat baru dengan mempertimbangkan hak retensi (pasal 5 huruf f kode etik advokat Indonesia);
- 7) Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (pasal 7 huruf h kode etik advokat Indonesia);
- 8) Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien pasal 7 huruf l kode etik advokat Indonesia).

5. Advokat dalam Islam

Adapun dalam hukum Islam, istilah advokat dapat disetarakan dengan istilah *Al-mahami* yang berasal dari bahasa arab yang berarti pengacara.⁹ Dalam fiqih islam, masalah advokat dibahas dengan dengan berasal dari kata bahasa *wakalah* atau *Al-wiklah* yang memiliki beberapa pengertian yakni penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang.¹⁰

Persyaratan seorang advokat dalam Islam adalah tertuju pada yang diwakili, orang yang diwakili dan hal-hal yang diwakilkan atau perkara yang diwakilkan. Syarat pemberi kuasa dalam Islam adalah harus terkait dengan hal yang akan diwakilkanya, harus orang yang berakal dan merdeka dan tidak dalam tekanan. Adapun syarat penerima kuasa adalah berakal, dewasa, bebas mengeluarkan pendapat, mengetahui pokok perkara atau orang yang ahli dalam meberikan pertimbangan, serta adanya kersaan antara pemberi dan penerima kuasa.

Adapun dasar hukum adanya Al- mahami dalam Islam terdapat QS Al-Kahf 18 :19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah

⁹Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Cet. I; Bandung: Putaka Setia, 2012), h.49.

¹⁰Asmuni Mth, “Eksistensi Pengacara Dalam perspektif Islam,” *Al-Mawardi* Edisi XII (2004), h. 28. <https://media.neliti.com/media/publications/26015-ID-eksistensi-pengacara-dalam-perspektif-islam.pdf>. (Diakses 27 Oktober 2018).

berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".¹¹

Ayat tersebut merupakan dasar yang membolehkan kita untuk berwakil dalam beberapa hal. Dalam mewakili ini merupakan konsekuensi dimana setiap manusia tidak dapat mengetahui semua hal yang dapat menegakkan hak-hak yang dimilikinya diantara kelemahan tersebut adalah tidak mengetahui hukum acara, sakit, atau sibuk sehingga tidak dapat mengahiri semua sidang yang dihadapinya maka diperlukan untuk mewakilinya selama proses perkara sebelum terungkapnya pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat dan penolakan tuduhan.

B. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum.

Pengertian bantuan hukum dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris, bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal servic*. Kedua kata tesebut mengandung arti yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan pencari keadilan agar semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.¹²

Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang advokat bantuan hukum dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh advokat kepada seorang secara cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena orang tersebut tidak mampu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

¹¹Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 295.

¹²Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 47- 48 .

pada pasal 1 angka (1) bantuan diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Frans Hendra Winata, bantuan hukum adalah konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan bagi semua orang dalam rangka keadilan untuk semua.¹³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu bantuan hukum diartikan sebagai layanan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, meliputi pembebasan biaya perkara. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang dilakukan oleh ahli hukum/advokat/ penasehat hukum ataupun sarjana hukum guna menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya agar mendapatkan keadilan.¹⁴

Di negara barat istilah bantuan hukum di pergunakan dalam dua arti yakni “*legal aid*” dan “*legal asistances*”. Dimana istilah legal aid dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibant suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis kepada mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan legal sistance dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang mampu atau pembetian bantuan jasa hukum yang dilakukan oleh advokat yang menggunakan honorium.

Terdapat pula istilah legal service yang dikemukakan oleh Clerance J. Dias yang diartikan sebagai pelayanan hukum yang diartikan sebagai langkah langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataanya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan,

¹³Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak di Dampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara* (Cet I; Jakarta : Gramedia,2011). h . 57.

¹⁴Andi Sofiyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Cet III; Jakarta: prenadamedia grup, 2015), h. 114.

kekayaan, dan sumber-sumber lainya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.¹⁵

Bantuan hukum untuk menjamin menjamin perlakuan yang sama sesuai dengan martabat manusia untuk terciptanya hukum yang adil dan manusiawi.

2. Dasar hukum pemberian bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku yakni;

- a. Undang-Undang Dasar 1945 yakni terdapat dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap warga negara sama kedudukanya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali”.¹⁶

Dengan pasal tersebut negara menjamin semua warganya memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum yang berlaku di negara Indonesia, yakni memiliki hak untuk dibela, dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal 4 yakni

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.¹⁷

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagupencari keadilan yang tidak mampu”.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang hak bagi setiap seorang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum

¹⁵Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h.4-6.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang- Undang Dasar 1945*.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (jakarta:Permata Press, 2012), h. 4.

(Pasal 56 Ayat 1) hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam peradilan.

d. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP yang berlaku sekarang ini, meskipun bukan sebagai Undang-Undang khusus tentang bantuan hukum, namun didalamnya dibuat beberapa pasal dan ayat yang mengatur tentang bantuan hukum, terutama dalam bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud daripada bantuan hukum. Selanjutnya akan diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP sebagai berikut :

- 1) Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum terdapat dalam pasal-pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60 dan 114 KUHAP. Di dalam pasal-pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam pasal 69 dan 70 (ayat 1). Menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan hukum kepada seorang yang tersangkut suatuperkara pidana sudah dapat diberikan bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan. Penasehat hukum dapat berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- 3) Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71. dalam ketentuan ini dimaksudkan agar penasehat hukum benarbenar memanfaatkan hubungan dengan tersangka

untuk kepentingan dari pada pemeriksaan. Bukan untuk menyalahgunakan haknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan.

4) Wujud dari pada bantuan hukum disini yang dimaksud adalah tindak-tindak atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka, yaitu :

- a) Pada Pasal 115 mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar kecuali kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar;
- b) Pasal 123, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan;
- c) Pasal 79 dan Pasal 124, penasehat hukum dapat mengajukan permohonan untuk diadakan praperadilan;
- d) Penasehat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi buat tersangka atau terdakwa sehubungan dengan Pasal 95, 97, dan 79;
- e) Pasal 156, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima;
- f) Pasal 182, penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan;
- g) Pasal 233, penasehat hukum dapat mengajukan banding;
- h) Pasal 245, penasehat hukum dapat mengajukan kasasi.

3. Jenis-jenis bantuan hukum.

Bantuan hukum cuma-cuma adalah bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum di indonesia di bagi ke dalam beberapa yaitu:

- a. Bantuan hukum konvensional adalah bantuan hukum langsung dalam bentuk pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan merupakan tanggung jawab seorang advokat yang profesional.
- b. Bantuan hukum konstitusional merupakan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat kurang mampu atau miskin untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat miskin bahwa mereka mempunyai hak sebagai subyek hukum sama kedudukannya dalam penegakan hukum. Bantuan hukum ini berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.
- c. Bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum yang diberikan untuk menyadarkan masyarakat miskin untuk menimbulkan kecakapan dan kemandirian masyarakat miskin dalam mewujudkan hak-hak dan kepentingannya di dalam berbangsa dan bernegara.

Selain bentuk tersebut jasa hukum yang diberikan oleh advokat terdiri dari dua jenis bantuan hukum yakni bantuan hukum litigasi yakni bantuan hukum yang diberikan oleh advokat terhadap perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum non litigasi adalah Bantuan hukum di luar pengadilan yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

4. Pemberi dan penerima bantuan hukum.

- a. Pemberi bantuan hukum

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-

Undang bantuan hukum.¹⁸ Pemberi bantuan hukum dapat berbentuk lembaga bantuan hukum independen, klinik hukum di perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga bantuan hukum yang berada dibawah naungan organisasi advokat.

Pemberi bantuan hukum yang diakui dalam perundang undanga yaitu:

- 1) Advokat/ penasehat hukum;
- 2) Posbakum;
- 3) Lembaga Bantuan Hukum;
- 4) Pekerja sosial / pendamping

Semua lembaga bantuan hukum harus memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan Undang-Undang untuk dinyatakan sebagai organisasi bantuan hukum. Syarat-syarat yang harus di penuhi antara lain yaitu:

- 1) Berbadan hukum;
- 2) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang bantuan hukum;
- 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 4) Memiliki pengurus; dan
- 5) Memiliki progam bantuan hukum¹⁹

Organisasi bantuan hukum yang memenuhi syarat dan telah lolos verifikasi yang dilakukan oleh menteri hukum dan ham dengan menunjuk kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga organisasi bantuan hukum dinyatakan sebagai pemberi bantuan hukum.

b. Penerima bantuan hukum.

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat 3.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum, Pasal 8.

Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Masyarakat yang dapat menerima bantuan hukum adalah masyarakat yang dapat menunjukkan surat keterangan miskin atau tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa setempat, atau dokumen lain yang dapat menggantikan fungsi SKTM.

Penerima bantuan hukum mempunyai beberapa hak yang dimilikinya yaitu:

- 1) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selamat penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- 2) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik profesi advokat; dan
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak penerima bantuan hukum juga mempunyai beberapa kewajiban yaitu`menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukumdan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Dan untuk mendapatkan bantuan hukum seorang penerima bantuan hukum harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;

- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa dan atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon;
- 4) Dalam hal pemohon tidak dapat menyampaikan permohonan secara tertulis maka permohonan dapat diajukan secara lisan.

5. Tujuan dan fungsi bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum tidak dilakukan sertamerta atas keinginan pemberi bantuan hukum tapi harus berdasarkan asas sebagai berikut;²⁰

- a. Keadilan, maksudnya adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, tertib;
- b. Persamaan kedudukan dihadapan hukum, adalah semua orang harus diperlakukan sama tanpa dibeda bedakan di hadapan hukum dan semua wajib menjunjung hukum;
- c. Keterbukaan, adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara lengkap, jujur, serta tidak memihak.
- d. Efisien adalah menggunakan segala sumberdaya anggaran untuk memberikan hasil yang terbaik;
- e. Efektifitas, adalah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya;
- f. Akuntabilitas adalah segala proses pelaksanaan bantuan hukum harus bisa dipertanggung jawabkan di masyarakat.

Tujuan bantuan hukum secara umum adalah membantua klien dalam memperoleh hak haknya dalam proses penegakan hukum. Tujuan diselenggarakannya bantuan hukum secara cuma-cuma diterangkan dalam pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah untuk menjamin serta memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk memperoleh

²⁰Sartono dan Bakhekti Suryani, *Prinsip -Prinsip Dasar Profesi Advokat* (Cet I; Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 45-46.

akses keadilan, untuk mewujudkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia dengan prinsip kedudukan yang sama dihadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan hukum secara merata di wilayah negara Republik Indonesia, dan untuk terciptanya peradilan yang efisien, efektif, dan bisa dipertanggung jawabkan.

Tujuan bantuan hukum di Indonesia sesuai yang terdapat dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum, dan mengadakan pembaruan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang. Berdasarkan tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan bantuan hukum tidak hanya semata mata atas dasar belas kasihan tapi bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat akan hak haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara,serta perbaikan pelaksanaan penegakan hukum.

Tujuan Program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena LBH mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- 2) Mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;
- 3) Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar LBH tersebut dapatlah diketahui kalau tujuan dari

bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).

6. Bantuan hukum dalam hukum Islam.

Pemberian bantuan hukum dalam Islam bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan dalam rangka perlindungan hukum terhadap semua masyarakat. Dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima hal pokok yakni hifzh al-din(memelihara agama), hizh al-nafsi (memelihara jiwa), hizh al aqli(memelihara akal pikiran), hizh al-nashli (memelihara keturunan).

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman terhadap pelaku yang dapat menganggu jiwa pelaku seseorang.

Pada dasarnya pemberian bantuan hukum dalam islam telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah dikenal sejak jaman pra islam. Pada saat itu, meskipun belum dikenal sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak hak lainnya sering kali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing masing pihak yang berselisih.

Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.²¹

Dalam sejarahnya nabi Muhammad Saw, sebelum menjadi Rasulullah pernah menangani kasus pertikaian atau perselisihan diantara masyarakat Mekkah berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi peletak batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Dan hal yang dilakukan Rasulullah dapat diterima oleh seluruh masyarakat Mekkah sehingga tidak menyebabkan terjadinya pertikaian fisik diantara mereka yang dapat merugikan mereka.²²

Pemberian bantuan jasa hukum dalam Islam dalam Islam dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah bisnis saja, tapi dapat menyangkut masalah keluarga, politik, perdagangan dan peperangan untuk menghindarkan terjadinya pertikaian di antara masyarakat sehingga akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan.

Terdapat beberapa profesi yang memiliki fungsi dan tugas memberikan jasa hukum dalam perspektif Islam, yakni hakim, mufti, dan musykilun-ahli.

a. Hakim

Hakim adalah orang yang ditunjuk untuk berperan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam penunjukan hakim disebut sebagai tahkim, dalam pengertian dalam bahasa Arab tahkim berasal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkim*; yang berarti menjadikan seseorang menjadi penengah

²¹Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 36.

²²Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 37.

sengketa.²³ Secara yuridis profesi hakim dapat dilihat sumber hukmn yakni dalam

QS. 4. An-Nisa:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.”²⁴

Pengangkatan hakim dalam islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan seorang hakim pada badan peradilan. Tugas hakim sama dengan hakim sebagaimana yakni memutuskan perkara di antara sesama manusia dengan adil, menyelesaikan perkara perselisihan sesama manusia, dan memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah Swt. Fungsi hakim adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, supaya menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan. Hakim berusaha agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan masing-masing pihak agar tercipta kedamaian diantara para pihak yang bersengketa cara tersebut biasa disebut dengan non-litigasi. Apabila cara perdamaian tidak bisa dijalankan oleh para pihak maka alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan melalui badan peradilan.²⁵

b. Mufti

Secara etimologi mufti diartikan sebagai orang yang memberi fatwa (*legal advice*). Mufti secara terminologi adalah orang-orang yang dipercayakan

²³Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hakum Positif*(Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), h. 39.

²⁴Kementrian Agama , *Al-Quran dan Terjemahnya* (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h.84.

²⁵Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hakum Positif*(Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), h. 46-47.

kepadanya hukum-hukum Allah Swt untuk disampaikan kepada manusia.²⁶ Dalam hukum nasional Indonesia mufti bisa disamakan dengan penasehat hukum karena mereka memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat awam yang belum mengetahui jelas tentang hukum yang ada dan berlaku di masyarakat secara kelembagaan di sebut dengan penasehat hukum atau konsultan hukum.

Sumber hukum keberadaan mufti dalam Islam adalah QS.Al Maiadah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang haram, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²⁷

Tugas mufti adalah memberikan putusan hukum dalam masalah tertentu tapi tidak mengikat bagi yang meminta fatwa atau petunjuk hukum. dalam pemerintah islam mufti selalu mendapat pengawasan dari pihak pemerintah dan organisasi yang diberi tugas untuk menjalankan pengawasan agar mencegah mufti yang tidak layak memberikan fatwa.

²⁶Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 48.

²⁷Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 106.

c. Mushali-alaih

Mushali-alaih secara bahasa berasal dari kata *ash-shulhu-yushilhu-mushalih*. *Ash-shuluh* adalah memutuskan perkara perkara atau perselisihan. Secara istilah adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri pelawanan antara orang yang belawanan. Dasar hukum adanya *mushalih alaih* adalah QS.49 Al-Hujarat:9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَقِّتْلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”²⁸

Mushalih alaih adalah mendamaikan perselisihan atau persengketaan di antara manusia dengan cara *islah* merupakan perbuatan yang mulia. Mendamaikan para pihak yang merupakan jasa hukum yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak seseorang yang dilanggar oleh pihak lain agar melakukan perjanjian untuk mengembalikan hak orang lain atau melaksanakan kewajibannya.

Untuk berlangsungnya perdamaian antara para pihak yang bersengketa melalui proses *ash-shulhu* memiliki tiga komponen yakni; pertama *ijab* yaitu ucapan yang disampaikan secara lisan, kedua yaitu *qabul* yaitu ucapan menerima tawaran , atau pengakuan pihak, pengakuan kesalahan atau kewajiban, *lapadz* adalah kata-kata secara tertulis yang mengandung pengakuan, tawaran dan apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian. perdamaian ini hanya dapat

²⁸Kementrian Agama , *Al-Quran dan Terjemahannya* (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 516.

diberlakukan pada perkara perdata (muamalat) atau yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum pidana (jinaya) tidak dapat dilakukan dengan dengan jalan perdamaian karena hal tersebut termasuk hukum publik.²⁹

Dari semua komponen yang memberikan bantuan hukum dalam perspektif Islam semua ditujukan untuk mencegah terjadinya perselisihan antar sesama manusia serta menyelesaikan pertikaian yang telah ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi untuk menciptakan perdamaian diantara pihak yang bertikai.



²⁹Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 54-55.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*). Pendekatan penelitian ini merupakan kualitatif yakni penelitian memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan Manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola pola yang berlaku¹. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari plutalisasi dunia kehidupan.

Metode ini untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian.² Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas masalah yang dihadapi. Metode ini menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori penelitian kualitatif ini tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya tapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Sugiyono menyatakan bahwa dalam peneitian kualitatif bersifat sementara, berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.³

¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (cet. kelima; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.20 – 21.

²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 81.

³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 81.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar ini penyusun sebagai tempat penelitian dikarenakan banyaknya jumlah kasus masyarakat yang kurang mampu yang ditangani serta kasus yang ditangani oleh para advokat yang berada di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar, serta selalu meningkatnya jumlah kasus pertahun yang selalu masuk untuk ditangani oleh para advokat yang berada di pos bantuan hukum pengadilan Negeri Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan dibantu juga dengan pendekatan yuridis normatif.

1. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya.
2. Pendekatan normatif syar'i adalah pendekatan dengan berdasar kepercayaan kepada Allah swt dan agama terutama berdasarkan kepada kitab suci al-Qur'an. Pendekatan seperti ini biasanya dilakukan dalam penelitian suatu agama yang diyakini oleh peneliti.

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara. Data primer merupakan informasi yang diperoleh

dari observasi, wawancara dan dokumentasi serta bukubuku/referensi utama yang terkait dengan judul penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian buku–buku karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui berbagai metode, yaitu:

1. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada objek yang akan diteliti dengan melihat atau mengamati kegiatan atau peristiwa yang dianggap perlu dan berhubungan dengan tujuan penelitian. Observasi partisipasi membantu untuk memahami lingkungan dengan menilai keadaan yang terlihat ataupun keadaan yang tersirat tidak dapat dilihat hanya dapat diraskan dengan memperhatikan kenyataan atau realitas di lapangan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi verbal atau secara langsung kepada para responden terkait dengan informan dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan dan disusun sedemikianrupa sebelumnya untuk mendapatkan data yang konkrit dan lebih rinci serta mendalam. Perlengkapan yang digunakan dalam wawancara adalah alat rekam dan alat tulis untuk mencatat data data penting yang diperoleh dari wawancara tersebut.

Dalam wawancara ini peneliti menggali data seperti halnya pada diskusi terarah, namun subyek yang diwawancarai adalah individual. Wawancara ini biasanya mencakup data secara luas namun mengarah pada masalah tertentu secara detail. Peneliti mendorong subyek untuk mengekspresikan pandangan

secara panjang lebar. Salah satu teknik disebut dengan “*the critica lincident study*” yaitu subyek diminta memberikan komentar terhadap suatu kejadian nyata. Teknik ini memberikan gambaran lebih tentang kepercayaan, sikap, dan perilaku subyek.⁴

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan sebuah poses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau study yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat mebanu menyelesaikan masalah peneltian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen. juga berupa foto lokasi hasil penelitian, orang yang bersangkutan, rekaman/video, dan bentuk lainnya yang digunakan pada saat penelitian dilaksanakan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam megumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan alat yang berfungsi sebagai pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara. Pedoman wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang telah disusun agar dalam melakukan wawancara peneliti dapat terarah untuk mendapatkan data sesuai dengan rumusan masalah.

⁴Lisa Harian, *Metode penelitian kualitatif*, (cet ke 2: kencana media group, 2009), h.86.

2. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh data yang berupa tulisan dan merupakan alat yang selalu ada dalam berbagai proses penelitian.

3. Alat Rekam

Alat ini berfungsi untuk mendokumentasikan berbagai data yang diperoleh berupa data dalam bentuk suara, gambar, maupun rekaman video.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisis, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk metode analisis yakni merupakan metode kualitatif yakni merupakan suatu langkah kritis dan teliti dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk suatu kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM DI POSBAKUM

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Makassar kelas IA Khusus.

a. Letak Pengadilan Negeri Makassar

Penelitian ini dilakukan di posbakum pengadilan Negeri Makassar yang beralamat di gedung Pengadilan Negeri Makassar Jl R.A. Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Adapun batas batas letak Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan jalan RA Kartini dan lapangan karebosi
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Jl Amangappa dan Monumen Mandala serta Kejaksaan Negeri Makassar.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan kantor bank Mandiri cabang Makassar.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Jl Jenderal Sudirman

Pengadilan Negeri Makassar terletak sangat strategis di tengah kota dan tidak teraluh jauh dari berbagai kantor pemerintahan seperti kantor walikota makassar, rumah jabatan Gubernur Sulsel, Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar. Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Raad Van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang Jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (sekarang jalan Ammanagappa) (Asmunandar, 2008). Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini namanya berubah lagi

menjadi Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Makassar. Dahulu bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad Van Justitia, merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-orang pribumi, letaknya di bagian selatan bangunan.

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan serta surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal standarisasi situs web pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Makassar berkewajiban melayani publik pencari keadilan, senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat sehingga peradilan yang bersih, profesional, obyektif dan berwibawa dapat diwujudkan.

b. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Makassar.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara pidana dan perkara perdata, serta tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan pidana hubungan industrial. Tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana, serta berperan

dalam menyelesaikan sengketa hak antara penggugat dan tergugat pada perkara perdata.

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus¹

2. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Posbakum pengadilan Negeri Makassar telah ada sejak tahun 2012 lembaga tersebut berada di bawah pengadilan Negeri Makassar dengan kerjasama antara pengadilan Negeri Makassar dengan LBH Pembimbing Rakyat. Posbakum pengadilan negeri Makassar berfungsi untuk membantu pengadilan pada perkara perkara yang ditangani pengadilan yang berupa perkara cuma-cuma. Sejak berdirinya sampai sekarang Posbakum PN makassar sangat membantu pengadilan dalam menangani perkara cuma-cuma yang dihadapi terdakwa di pengadilan Negeri Makassar.

Posbakum adalah lembaga yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan kurang paham hukum serta membantu pengadilan dalam mendampingi terdakwa yang mendapat perkara cuma-cuma (prodeo) yang ditangani oleh pengadilan Negeri Makassar baik tindak pidana,

¹<http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi>, Webstite Resmi Pengadilan Negeri Makassar (Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2018) Pukul 08:00 Wita

perdata, maupun pidana khusus. Kerjasama antara pengadilan dan LBH dimana pengadilan menyediakan tempat serta fasilitas yang dibutuhkan serta LBH berfungsi memberikan jasa bantuan hukum melalui fasilitas yang disediakan pengadilan.

Posbakhum PN Makassar di pimpin oleh bapak Drs.Ing. Andi Ware, S.H.,M.H. bersama dengan 16 orang advokat dan calon advokat. Berikut data jumlah kasus yang telah di tangani oleh posbakum Pengadilan Negeri Makassar

B. Tindakan Advokat Dalam menyelesaikan Persoalan Hukum yang didadapi Masyarakat Kurang Mampu.

Advokat memiliki peran yang sangat strategis dalam segala proses peradilan baik perkara pidana, perdata, maupun pidana khusus, advokat sebagai penasehat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan Undang-Undang terhadap penegak hukum. ketiadaan advokat dalam proses peradilan pidana memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil akhir putusan yang dapat merugikan terdakwa atau terpidana.

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum yang lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kesetaraan antara advokat dan penegak hukum lainnya karena advokat menjalankan fungsi dan perangnya harus tunduk pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Advokat dalam memberikan jasa hukumnya dapat dijumpai mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang. Dalam melakukan fungsinya memberikan jasa hukum, advokat harus mempunyai surat kuasa dari pemberi kuasa untuk mendampingi, mewakili, memberi nasehat hukum

kepada *klienya*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya para advokat yang menjalankan profesi serta layanan bantuan hukumnya harus tunduk kepada kode etik advokat Indonesia yang mengatur agar para advokat tidak merugikan klienya serta tidak merugikan advokat lainnya.

Advokat mempunyai peranan penting dalam proses penyelesaian perkara yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu. Advokat juga berperan untuk membantu lembaga peradilan untuk memberikan nasehat hukum kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan yang diberikan oleh paraadvokat tersebut juga untuk menghindarkan tersangka dari kesewenang-wenangan para penegak hukum.

“Dalam memberikan pelayanan hukum para advokat di pos bantuan hukum di pengadilan negeri makassar harus memenuhi beberapa syarat yakni sarjana hukun, pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh peradi dan perguruan tinggi, Magang di kantor advokat selama dua tahun, pemeriksaan laporan dan pelantikan dimana yang menyumpah adalah pengadilan Tinggi dan yang melantik adalah ketua peradi.”²

Dengan hal tersebut maka tidak semua orang dapat memberikan bantuan hukum di pos bantuan hukum pengadilan negeri Makassar tapi hanya mereka yang mempunyai kompetensi serta telah mendapat pendidikan hukum hukum yang cukup untuk dapat melayani berbagai permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat kurang mampu, agar para penerima layanan dapat diselesaikan masalahnya dengan baik dan profesional sehingga mereka merasa rasa keadilanya telah dipenuhi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dibuatnya.

Para advokat di posbakum pengadilan negeri makassar menerima semua laporan yang masuk untuk diselesaikan persoalan hukumnya.

“Kami di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar menerima semua perkara yang diberikan atau dilaporkan ke posbakum baik kasus tersebut pidana umum seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, narkoba, perkelahian. Maupun perkara perdata serta pidana khusus seperti tipikor dan perkara hubungan industrial atau tenaga kerja. Jika kasus kasus yang

²Drs.ing. Andi Ware S.H., M.H. (75 Tahun) Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Makassar ,Wawancara, Makassar 10 Oktober 2018

dilaporkan ke pos bantuan hukum itu memenuhi syarat yang telah ditetapkan.”³

Hal tersebut menunjukkan bahwa para advokat yang berada di posbantuan hukum pengadilan Negeri Makassar memiliki perilaku yang baik karena mereka para advokat di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar tidak menolak perkara yang diberikan kepadanya untuk diselesaikan dengan baik tanpa membedakan orang yang mereka tangani kasusnya. Dalam menangani kasus mereka memberikan pelayanan yang maksimal walaupun perkara yang mereka tangani merupakan perkara cuma-cuma yang tidak mempunyai bayaran dari orang yang mendapatkan jasanya. Pelayanan yang mereka berikan sama dengan pelayanan yang mereka berikan dengan apaya yang mereka berikan dengan dengan perkara yang dibayar oleh orang yang mendapatkan jasa yang diberikanya. Pelayanan tanpa membedakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur profesi advokat agar mereka memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan tingkat perekonomian.

Pelayanan hukum yang diberikan oleh para advokat di posbakum Pengadilan Negeri Makassar hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peratursn perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan hukum yang diberikan hanya dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu yang mempunyai masalah hukum, bukan diberikan kepada masyarakat yang mampu. Mereka para advokat tidak memberikan pelayana kepada masyarakat yang mampu, mereka hanya diberikan petunjuk untuk menggunakan jasa advokat yang membayar jika mereka datang ke pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar.

³Drs.ing. Andi Ware S.H., M.H. (75 Tahun) Kepala Posbakum Pengadilan NegeriMakassar ,Wawancara, Makassar 15 Oktober 2018

Di posbakum Pengadilan Negeri Makassar para advokat mendampingi para terdakwa yang kurang mampu sampai mereka mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Para advokat akan mendampingi mereka di muka sidang sampai perkara yang dialami oleh masyarakat kurang mampu mendapatkan putusan dari majelis hakim yang menangani perkara yang mereka alami. Sehingga masyarakat yang kurang mampu mendapatkan hak-haknya selama menjalani persidangan perkara yang diperbuatnya.

“Kami di posbakum tidak mendapatkan bayaran dari masyarakat yang kurang mampu karna kami juga berempati kepada mereka dimana mereka kurang mampu yang pekerjaannya hanya buru tani, buru, tukang cuci, tukang bentor. Tapi biasanya mereka ada juga yang membawakan kami makanan, ada juga pernah membawakan saya jalgangkote.”⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa para advokat benar-benar memberikan bantuan hukum tanpa memungut biaya dari masyarakat yang kurang mampu. Dan mereka juga tidak menyulitkan para pencari keadilan dengan membuat berbagai dokumen hukum tanpa adanya biaya yang biasanya jika masyarakat kurang mampu melalui advokat yang berbayar membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan tanpa adanya biaya yang dibayar tersebut maka semua masyarakat dapat merasakan keadilan yang merata meskipun mereka tidak mempunyai biaya yang cukup.

Berikut adalah jumlah kasus yang pernah ditangani oleh para advokat yang berada di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar yang menunjukkan bahwa para advokat sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat.

⁴Drs.ing. Andi Ware S.H., M.H. (75 Tahun) Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 10 Oktober 2018

Tabel 1
Data kasus yang telah ditangani oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan
Negeri Makassar

Periode	Kasus		Jumlah
	Anak	Dewasa	
Januari- Desember 2012	1	65	66
Januari- Desember 2013	1	53	54
Januari- Desember 2014	49	126	175
Januari- Desember 2015	166	226	392
Januari- Desember 2016	184	306	490
Januari- Desember 2017	75	465	540
Januari- April 2018	6	110	116
Jumlah	482	1351	1833

Sumber: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Dari data tersebut menunjukkan bahwa para advokat yang berada di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar mempunyai perilaku yang baik karena setiap tahun mulai dari awal tahun berdirinya sampai pertengahan tahun 2018 menangani kasus dengan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan terus meningkatnya jumlah kasus yang masuk untuk diselesaikan oleh para advokat maka diperlukan berbagai perilaku yang baik sehingga para pengguna jasa di pos bantuan hukum di pengadilan negeri makassar selalu terlayani dengan baik sehingga mereka merasa bahwa hak-hak yang dimilikinya selalu dipenuhi.

Tabel 2
Data Kasus Yang Ditangani Posbakum Pengadilan Negeri Makassar

PERIODE	KASUS	
	PERKARA	SELESAI

MEI	59	52
JUNI	54	49
JULI	47	33
AGUSTUS	64	52
SEPTEMBER	63	45
OKTOBER	42	29
NOVEMBER	48	16

Sumber: Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh para advokat di pos bantuan hukum pengadilan negeri makassar adalah kasus yang dialami oleh Pendi alias Ipen Bin jaba yang melakukan tindak pidana khusus narkoba dimana dalam kronologi kasusnya mereka diketahui menjadi pengedar dan pemakai narkoba. yang mana perkara tersebut merupakan perkara yanguntutanya melewati lima tahun dan memerlukan pendamping hukum untuk menyelesaikan proses persidangan. Kasus tersebut bermula pada tanggal 08 Februari dimana ipen atau terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba. Kasus yang ditangani oleh polda sulawesi selatan ini memiliki tuntutan yang melebihi lima tahun jadi merupakan perkara yang wajib didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana dimana terdakwa yang memiliki tuntutan yang melebihi 5 tahun wajib didampingi oleh penasehat hukum di dalam proses persidangan apabila kurang mampu maka negara wajib menyediakan advokat yang wajib mendampingi secara cuma-cuma.

Dalam kasus tersebut yang mendampingi terdakwa adalah petugas pos bantuan hukum pengadilan negeri makassar yakni bapak Drs. Ing. Andi Ware, S.H.,M.H. yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018. Dalam putusnya pengadilan menjatuhkan pidana selama 4 tahun penjara.

Kasus lain yang pernah ditangani adalah kasus Muhammad Kurniawan Nurfin dimana melakukan tindak pidana penyimpanan uang palsu yang dituntut pidana penjara selama 15 tahun yang didampingi oleh advokat yakni Aisyah H. Ibrahim, S.H. Terdakwa mendapatkan pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara.

C. Syarat-Syarat dan Bentuk Jasa Hukum yang Diterimah Masyarakat Kurang Mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Makassar.

1. Syarat-syarat Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di lembaga peradilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan layanan di pos bantuan hukum. posbakum adalah layanan yang dibentuk dan ada di setiap lingkup pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pencari keadilan yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum tidak dapat dilakukan begitu saja hal tersebut dikarenakan dalam pemberian bantuan hukum harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan Mahkamah Agung. Sejatinya pemberian bantuan hukum di atur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun

2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh bantuan hukum yakni;

- a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/kepala kelurahan/kepala wilayah yang setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan posbakum pengadilan, dan disetujui petugas posbakum pengadilan.⁵

“Jika ingin mendapatkan berbagai layanan bantuan bagi masyarakat kurang mampu adalah dengan membawa bukti keterangan tidak mampu dari lurah tempat dia berdomisili untuk membuktikan bahwa dia merupakan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar advokat untuk mendampingi.”⁶

Dari pemaparan tersebut yang menjadi syarat utama dalam pemberian bantuan hukum adalah dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari kepala kelurahan tempat domisili calon penerima bantuan hukum. apabila masyarakat kurang mampu datang ke posbakum tanpa membawa bukti surat

⁵Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*.

⁶Hardiyanti Mufti, S.H., M.H. (35 Tahun) Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 10 Oktober 2018.

keterangan tidak mampu maka tidak dapat dilayani secara maksimal oleh petugas posbakum dan hanya diberi penjelasan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk dilengkapi agar dapat memperoleh layanan di posbakum.

2. Bantuan Hukum Yang Diterimah Masyarakat Kurang Mampu

Bantuan hukum yang diberikan oleh para advokat di pos bakum Pengadilan Negeri Makassar meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang di hadapi masyarakat. Memang bantuan hukum yang di terima masyarakat berupa bantuan hukum dimulainya perkara tersebut masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai mempunyai ketetapan hukum yang tetap dari pengadilan.

Orang atau kelompok yang tidak mampu dapat menerima:⁷

- a. penggugat/pemohon
- b. tergugat/ atau pemohon
- c. terdakwa atau
- d. saksi

Bantuan hukum yang diterima mulai dari tingkat pertama sampai mendapatkan putusan tetap dari pengadilan yakni :

1) Pemberian informasi

Seseorang yang mengalami permasalahan hukum pasti tidak mengetahui secara rinci tentang masalah hukum yang dihadapinya maka mereka membutuhkan seorang yang mengerti hukum yang dapat menjelaskan masalah yang dihadapinya serta bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Diantara masalah yang sering dihadapi para pencari keadilan tersebut adalah kendala dalam pembuatan surat gugatan, sehingga mereka akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu lembaga yang memiliki peran tersebut

⁷Pasal 22 ayat (3) perma 1/ 2014.

adalah pos bantuan hukum yang didalamnya terdapat beberapa advokat yang berfungsi untuk memberikan informasi dan tatacara untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Di posbakum mereka akan diberikan berbagai informasi tentang masalah hukum yang dihadapi serta cara penyelesaian masalah tersebut.

2) Mendapatkan Konsultasi

Para masyarakat yang kurang mampu yang datang di pos bantuan hukum di pengadilan negeri makassar akan diberikan berbagai petunjuk tentang masalah hukum yang mereka alami. Konsultasi hukum yang diberikan berupa nasehat nasehat hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu. Apakah tindakan yang mereka lakukan akan berdampak hukum atau tidak.

3) Pendampingan di muka sidang

Pendampingan adalah pendampingan yang dilakukan oleh advokat terhadap para tersangka yang menjalani persidangan di pengadilan pendampingan yang dilakukan oleh para advokat di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar yakni mendampingi terdakwa selama menjalani persidangan hingga mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pendampingan yang dilakukan oleh advokat biasanya berlangsung selama 7 kali sidang yang terdiri atas sidang pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi (saksi yang diperiksa polisi), pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi yang meringankan, tuntutan tertulis, pembelaan advokat, requisitor, pembacaan putusan. Biasanya berlangsung dalam waktu dua bulan hingga terdakwa mendapatkan putusan terhadap kejahatan yang pernah mereka kerjakan. Tanpa adanya advokat yang mendampingi terdakwa biasanya jaksa senang tanpa adanya advokat yang mendampingi terdakwa.⁸

Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh advokat dapat menghindarkan seorang terdakwa dari perlakuan yang tidak adil dari penuntut umum dalam persidangan. Dalam menjalani persidangan terdakwa yang kurang mampu dapat mengerti bagaimana sehingga mereka dituntut dengan pasal

⁸Drs.ing. Andi Ware S.H., M.H. (75 Tahun) Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 10 Oktober 2018

demikian. Dengan adanya advokat juga dapat memberikan pertimbangan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusan para hakim dapat berlaku adil serta mendapat putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4) Pembuatan dokumen

Pembuatan dokumen adalah kegiatan membuat berbagai berkas yang dibutuhkan untuk menjalani proses persidangan di pengadilan maupun yang berada di luar pengadilan.

“Biasanya masyarakat tidak dapat membuat dokumen yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Seperti dalam perkara mereka biasanya hanya menyampaikan secara lisan apa yang mereka alami lalu kami membuat dokumen tersebut secara terulis agar dapat diterima di pengadilan.”⁹

Dokumen yang biasanya dibuat adalah berkas pledoi untuk perkara pidana serta surat tuntutan dan pembelaan jika dalam perkara perdata. Berkas tersebut merupakan berkas yang sangat penting yang diperlukan untuk menjalani persidangan di pengadilan. Sebagai berkas yang harus menjelaskan bagaimana membela masyarakat yang kurang mampu.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Advokat Yang Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu.

Memberi bantuan kepada sesama manusia merupakan suatu hal yang mulia dalam Islam karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana Q.S Al- Maidah 5: 2 yang berbunyi

Terjemahanya;

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

⁹Hardiyanti Mufti, S.H., M.H. (35 Tahun) Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 10 Oktober 2018

Nya.”¹⁰ Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah sangat berat siksa-

Sebab turunya ayat tersebut adalah dalam riwayat bahwa terhalangnya Rasulullah Saw. Dan para sahabat mengerjakan umrah di Masjidil Haram Mekkah (yang menimbulkan perjanjian hdaidiyyah antara kaum muslimin dan musyrikin), para sahabat nabi merasa kesal karenanya. Pada suatu hari lewatlah orang orang musyrikin dari penduduk *Masyriq* (Timur) akan menjalankan umrah. Berkatalah para shahabat Nabi Saw.: “mari kita cegat mereka sebagaimana mereka pernah mencegat sahabat sahabat kita.” Maka Allah menurunkan ayat ini QS Al-Maidah ayat 2 sebagai larangan untuk berbuat balas dendam.¹¹

Dari ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Tolong menolong merupakan suatu kebaikan yang sangat diridohi oleh Allah Swt dan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan untuk meringankan beban antar sesama manusia. Dan dalam tolong menolong menurut anjuran ayat sebelumnya adalah tolong menolong tersebut harus senantiasa dalam hal- hal kebaikan yang tidak merugikan bagi banyak ummat lain akibat perbuatan yang kita lakukan untuk tolong menolong. Tolong menolong yang yang diperintahkan adalah tolong menolong dalam hal kebaikan yang dapat mendatangkan masalah dan tidak mendatangkan kemudaratn.

Membantu dalam hal kebaikan dapat dilakukan dengan segala kemampuan yang kita miliki baik berupa harta, ilmu, maupun perbuatan. Dimana orang berilmu membantu orang lain dengan ilmu yang dimilikinya, orang kaya membantu orang dengan kekayaan yang mereka miliki.

¹⁰Kementrian Agama , *Al-Quran dan Terjemahnya* (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h.106.

¹¹H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang historis Turunya Ayat-Ayat Al-Quran* (Bandung: Penerbit Diponegoro), h.181.

Dengan demikian advokat yang menjalankan perannya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum merupakan suatu perbuatan yang mulia. Karena para advokat membantu meringankan beban seorang terdakwa yang sedang menjalani persidangan. Dan dengan ilmu yang dimiliki oleh para advokat mereka menggunakan ilmu tersebut untuk jalan kebaikan dimana mereka mendampingi seseorang yang kurang mampu untuk mendapatkan hak-haknya yang sama dengan orang yang mampu di hadapan hukum.

Dalam pembelaan tersebut juga advokat memberikan hak-hak orang yang kurang mampu untuk mendapatkan Bantuan hukum hanya diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Dengan adanya bantuan hukum tersebut para advokat juga menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang penegak hukum.

Selain dalam surah tersebut juga terdapat di dalam QS. Al-Hujarat/49/9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِّلُوا إِلَىٰ تَبَعٍ ۖ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahanya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”¹²

Ayat tersebut merupakan ayat tentang penyelesaian sengketa atau pertikaian antara dua orang dimana setiap orang diwakili untuk menyelesaikan persengketaan dengan cara damai. Dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk

¹²Kementrian Agama , *Al-Quran dan Terjemahanya* (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 516.

menjadi pendamai diantara dua orang yang bertikai dimana tugas dan fungsi seorang advokat adalah mendampingi seseorang yang mengalami masalah hukum yang dimana tugasnya adalah menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Hal tersebut sesuai dengan tugas advokat dimana dia berperan untuk menyelesaikan sengketa secara damai antara pihak yang bertikai tanpa melalui proses persidangan yang biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah

1. Peran para advokat di pos bantuan hukum adalah melakukan berbagai tindakan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat kurang mampu yakni menerima semua laporan perkara yang dilaporkan kepada pos bantuan hukum, advokat mewakili para terdakwa di pengadilan sampai para terdakwa mendapatkan putusan yang tetap, serta semua bantuan yang diberikan oleh para advokat tidak membebankan biaya perkaranya kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan di mana penerima berdomisili, yang kedua adalah surat tunjangan kemiskinan serta surat tidak mampu membayar biaya perkara yang dibuatkan oleh petugas posbakum yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Dan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat kurang mampu di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar adalah mendapat pendampingan dalam persidangan, konsultasi, pemberian informasi serta pembuatan dokumen hukum.
3. Pandangan hukum Islam terhadap peran advokat adalah perbuatan yang mulia dimana para advokat menggunakan ilmu dan kemampuan yang mereka miliki untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

B. Implikasi Penelitian

1. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas yang berada di pengadilan untuk digunakan oleh para advokat untuk melayani masyarakat kurang mampu. Agar para advokat dapat meningkatkan kinerjanya dalam membantu masyarakat kurang mampu.
2. Para advokat harus terus meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar agar kedepannya mampu menangani berbagai permasalahan hukum yang dilaporkan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik.
3. Para advokat harus melayani semua kliennya tanpa membedakan baik menggunakan honorium maupun klien yang menggunakan jasa hukum cuma-cuma.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)* Kencana Prenadamedia Group. Jakarta 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.III, Cet II; Jakarta: Balai pustaka, 2002.
- H.A.A. Dahlan, Dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-ayat Al-Quran*. Cet VI: Bandung ; Penetbit Diponegoro, 2003.
- Handayani, Febri. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksar, 2015.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet VIII; Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Cet I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Sartono dan Bhekti Suryani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi advokat*. Cet I; Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Ed I. Cet XXIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Viswandro, Dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet I; Jakarta: Sinar Grafik, 2016.

Winata, Frans Hendra, *Bantuan Hukum (Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara)*. Cet I; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Peraturan perundang-undangan:

Republik indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pustaka Buana, 2014

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Jurnal, skripsi dan situs online:

Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam perspektif Islam," Al-Mawardi Edisi XII (2004), h. 28. <https://media.neliti.com/media/publications/26015-ID-eksistensi-pengacara-dalam-perspektif-islam.pdf>. (Diakses 27 Oktober 2018).

Mariani, "Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam". *Tesis*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.

Nurjannah, "peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (studi kasus: Tahun 2011-2015 di Kota Makassar)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

<http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami>


PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: /HPK/2018


Judul Skripsi: **Peran Advokat dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus POSBAKUM Pengadilan Negeri Makassar).**

Gowa, 28 September 2018


Penyusun,


zulfiqar
Nim. 10200114001

Pembimbing I

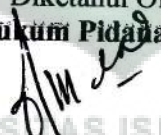

Dr. Hj Rahmatiah HL, M.Pd.
Nip. 19690606 199403 2 003

Pembimbing II


Dr. Alimuddin, M.Ag
Nip. 19720302 200501 1 005


Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan


Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712199703 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**


Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 196210161990031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Zulfiqar**, NIM: 10200114001, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul, **"Peran Advokat Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Negeri Makassar)"** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang ujian hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, November 2018

Pembimbing I



Dr. Hj Rahmatiah HL, M.Pd
NIP.1969060 199403 2 003

Pembimbing II



Dr. Alimuddin, M.Ag
NIP.19720302 200501 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Zulfiqar**, NIM: 10200114001, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Peran Advokat Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassar)**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, November 2018

Pembimbing I

Dr. Hj Rahmatiah HL, M.Pd
NIP.1969060 199403 2 003

Pembimbing II

Dr. Alimuddin, M.Ag
NIP.19720302 200501 1 005

Penguji I

Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.
NIP. 197312312005011034

Penguji II

Ansar Sinilele, S.H., M.H.
NIP.19690717 20141110 001

Nomor : B- *5220* /SH.01/PP.00.9/10/2018

Samata, *04* Oktober 2018

Lamp : 1 (Satu) Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Zulfiqar
Nim : 10200114001
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Taddopuli XVIII Baru Kota Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

"Peran Advokat dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus POSBAKUM Pengadilan Negeri Makassar)"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd
2. Dr. Alimuddin, M. Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 4 Oktober s/d 31 Oktober 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 15 Oktober 2018

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 213 . /HKM/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Drs. JUNAEDI, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Zulfiqar.**
NIM : 10200114001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Toddopuli XVIII Baru Kota Makassar.
Judul Skripsi : **Peran Advokat dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus POSBAKUM Pengadilan Negeri Makassar).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 04 Oktober 2018 Nomor : B-3220/SH.01/PP.00.9/10/2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Drs. JUNAEDI, SH.,MH

NIP.196111111982031003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ing. Andi ware, S.H.,M.H.

Pekejaan : Advokat

Umur : 75 tahun

Alamat :- Jl Cendrawasih No. 285, Makassar

Menerangkan bahwa - Jl R.A. Kartini No. 18/23, Makassar (Posbakum PN. MAKASSAR)

Nama : Zulfiqar

Nim : 10200114001

Fakultas : Syariah dan Hukum


Alamat : jl Toddopuli 18 baru

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Peran Advokat Dalam Membantu Masyarakat Miskin Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Negeri Makassar) ”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Oktober 2018

Narasumber


Drs. Ing. Andi ware, S.H.,M.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Rahman Dalle, S.H.

Pekejaan : Advokat

Umur : 54 tahun

Alamat : BTN. Minasa Upa Blok G.1 No. 18

Menerangkan bahwa

Nama : zulfiqar

Nim : 10200114001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : jl Toddopuli 18 Baru

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Peran Advokat Dalam Membantu Masyarakat Miskin Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Negeri Makassar) ”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Makassar , 15 Oktober 2018

Narasumber

Abd Rahman Dalle, S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardiyanti Mufti, S.H., M.H

Pekejaan : Advokat

Umur : 25 tahun

Alamat : Jl. Dg. Ramang, Kompleks Bumi Sudiang Raya Blok I No. 12

Menerangkan bahwa

Nama : Zulfiqar

Nim : 10200114001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : Jl Toddopuli 18 baru

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Peran Advokat Dalam Membantu Masyarakat Miskin Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Negeri Makassar) ”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Oktober 2018

Narasumber

Hardiyanti Mufti, S.H., M.H.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



zulfiqar lahir di Sinjai 25 Mei 1996, anak ke pertama dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan Abd latif dan Jubaedah. Penulis memulai pendidikan di SDN 43 Bontopedda tamat pada tahun 2008, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sinjai Selatan dan selesai pada tahun 2011, kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sinjai Selatan dan tamat Pada tahun 2014.

Pasca selesai di sekolah menengah atas penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Penulis menyelesaikan studi pada 21 November 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R